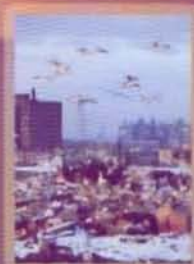


Sukanda Husin, S.H., LL.M.

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA



Penerbit



SINAR GRAFIKA

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN INDONESIA

Hukum lingkungan dan penegakannya di Indonesia diuraikan dengan gamblang dalam buku ini. Pembahasannya meliputi:

- Sejarah hukum lingkungan serta hukum lingkungan internasional dan regional Asia Tenggara yang mempengaruhi evolusi hukum lingkungan Indonesia.
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup kemudian dilanjutkan dengan pembahasan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup guna mengungkapkan tabir ketidakefektifan dalam pelaksanaannya.
- Kelemahan-kelemahan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 setelah berlakunya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, yang identik dengan pelaksanaan otonomi daerah.
- Peraturan perundang-undangan tentang pencegahan dan pengendalian pencemaran, yang dimulai dengan pencemaran udara, air, tanah dan laut. Kemudian bahasan diikuti dengan uraian tentang pengaturan perlindungan keanekaragaman hayati dan perlindungan hutan.
- Penegakan hukum dipecah menjadi penegakan hukum administrasi, perdata dan pidana karena sesuai dengan kedudukannya sebagai *functioneel rechtsgebeid*. Masing-masing upaya penegakan hukum diiringi dengan bahasan kasus-kasus.

ISBN 979-007-258-9



9 789790 072589

Penegakan Hukum Lingkungan

DAFTAR ISI

PRAKATA	v
DAFTAR ISTILAH	xiii
 BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN HUKUM LINGKUNGAN	 1
A. Sejarah Hukum Lingkungan.	1
1. Dari UU No. 4 Tahun 1982 ke UU No. 23 Tahun 1997	4
2. Pengaturan Lingkungan pada Masa UUKPPLH	6
3. Pengaturan Lingkungan pada Masa UUPPLH.....	10
4. Keharusan Penyempurnaan UUPPLH	14
B. Hukum Lingkungan Dalam Otonomi Daerah	15
 BAB 2 PENGARUH HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL TERHADAP HUKUM LINGKUNGAN NASIONAL.....	 20
A. Pendahuluan	20
B. Hukum Lingkungan Internasional	21
1. Hukum Kebiasaan Internasional	21
2. Hukum Konvensi Internasional	23
C. Penerapan Hukum Lingkungan Internasional oleh Pengadilan Domestik.	30
D. Hukum Lingkungan ASEAN	30
E. Kepatuhan (<i>Compliance</i>) dan Penyelesaian Sengketa ...	34
F. Tanggung Jawab Negara (<i>State Responsibility</i> dan <i>Liability</i>)	36
G. Implikasi Hukum Internasional Bagi Indonesia	38

BAB 3 PENGATURAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	43
A. Pencemaran Udara	43
1. Pengaturan Secara Umum	43
2. Pengaturan Secara Khusus	48
3. Ketentuan yang Berasal dari Norma Hukum Internasional	54
B. Pencemaran Air	62
1. Baku Mutu Air Limbah Domestik	66
2. Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara	66
3. Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air	66
4. Pengelolaan Limbah Radioaktif	67
C. Pencemaran dan Perusakan Tanah	70
D. Pencemaran Laut	72
E. Perlindungan Keanekaragaman Hayati	74
1. Pengaturan Secara Umum	74
2. Pengaturan Secara Khusus	78
F. Perlindungan Hutan dan Lahan	81
 BAB 4 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN ADMINISTRASI	92
A. Instrumen Hukum Administrasi	92
1. Baku Mutu Lingkungan	94
2. Perizinan	95
3. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal)	96
4. Audit Lingkungan	98
5. Pengawasan Penataan (<i>Monitoring Compliance</i>) .	99
B. Penegakan Sanksi Administrasi	101
C. Studi Kasus Penegakan Sanksi Administrasi	102
 BAB 5 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PERDATA ...	104
A. Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan	104

B. Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan	104
1. Hak Gugat (<i>Legal Standing</i>) Secara Umum	105
2. Hak Gugat (<i>Legal Standing</i>) LSM	105
3. Gugatan Ganti Rugi Acara Biasa	106
4. Gugatan Perwakilan Kelas (<i>Class Action</i>)	108
5. Studi Kasus Gugatan Ganti Rugi Acara Biasa	111
6. Studi Kasus Gugatan Ganti Rugi Acara <i>Class Action</i>	114

BAB 6 PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN PIDANA 121

A. Pendahuluan	121
B. Macam-Macam Delik Lingkungan dan Ancaman Hukuman	122
C. Tindakan Tata Tertib	123
D. Kejahatan Korporasi (<i>Corporate Crime</i>)	124
E. Pertanggungjawaban Pidana Lingkungan	127
1. Elemen "Perbuatan Pidana"	127
2. Elemen "Barangsiapa"	129
3. Elemen "Kesengajaan atau Kealpaan"	129
4. Elemen "Tidak Adanya Unsur Pemaaf"	130
F. Studi Kasus	130
1. Kasus Kebakaran Lahan di Riau	130
2. Kasus Pencemaran Teluk Buyat di Manado	133

BAB 7 PENDEKATAN PENAATAN DALAM HUKUM LINGKUNGAN 139

A. Pendahuluan	139
B. Macam-Macam Pendekatan	140
1. Pendekatan Atur dan Awasi (<i>CAC Approach</i>)	140
2. Pendekatan Atur Diri Sendiri	145
3. Pendekatan Ekonomi (<i>Economic Approach</i>)	149
4. Pendekatan Perilaku (<i>Behaviour Approach</i>)	154
5. Pendekatan Tekanan Publik (<i>Public Pressure Approach</i>)	155

DAFTAR PUSTAKA 159

PROFIL PENULIS 168